

## OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DESA WANTILAN

Tinda Irawaty<sup>1</sup>, Widuri Wulandari<sup>1\*</sup>, Titin Rohayatin<sup>1</sup>, Noer Apptika Fujilestari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani

\*email: [widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id](mailto:widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id)

### Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan perangkat desa dalam e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi. Dengan berbagai bentuk dan tujuan, organisasi di buat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan organisasi dan dalam menjalankan misinya di atur dan dikelola oleh karyawan. Implementasi e-government tingkat desa sebagai bentuk digitalisasi desa agar desa menjadi *smart village*. Kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan berupa kegiatan sosialisasi dengan perangkat desa, tahap pelaksanaan dilakukan dengan penyampaian materi, *focus group discussion* (FGD) dan pelatihan atau tutor, dan tahap terakhir adalah evaluasi dengan menanyakan kepada peserta tentang pengetahuan terkait *e-commerce*. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta memahami *e-government* tetapi masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut.

**Kata Kunci:** E-government; Pemerintah Desa; Sumber Daya Manusia

### Abstract

*Community service carried out aims to improve the knowledge, abilities, and skills of village officials in e-government in administering government at the village level. Human Resource is an important factor in an organization. With various forms and objectives, the organization is made based on various visions for the benefit of the organization and in carrying out its mission it is managed and managed by employees. Implementation of village-level e-government as a form of village digitization so that villages become smart villages. This activity is carried out in three stages, namely the preparation stage in the form of socializing activities with village officials, the implementation stage is carried out by delivering material, focus group discussions (FGD) and training or tutors, and the last stage is an evaluation by asking participants about knowledge related to e-commerce. government. The results show that participants understand e-government but still need further guidance.*

**Keywords:** E-government, Human Resources, Village Government

## A. Pendahuluan

Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan paling rendah menjadi garda terdepan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh sebab itu kemampuan dan kapasitas aparatur desa memegang peranan yang sangat penting. Dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapinya, aparatur pemerintahan desa dituntut untuk memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk meningkatkan literasi dan pemahaman digital di tingkat pemerintahan terendah yakni desa yaitu dengan meluncurkan program desa cerdas (*smart village*). Desa harus menaruh perhatian pada perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini, terlebih penguasaan teknologi informasi yang menjadi salah satu indikator kemajuan bagi suatu negara. Desa sebagai bagian dari negara sudah seharusnya mulai menerapkan teknologi informasi mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan pengelolaan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya bahkan juga dalam bidang pembangunan desa. Penerapan teknologi di desa sejalan dengan berkembangnya konsep pembangunan desa berbasis teknologi informasi yang biasa disebut *smart village*. Konsep *smart village* adalah desa yang menerapkan teknologi tepat guna untuk mengembangkan potensi, meningkatkan ekonomi, dan menciptakan kemudahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani memiliki kepedulian untuk dapat mewujudkan program yang telah dibuat oleh pemerintah serta untuk membantu desa (masyarakat), yaitu dengan adanya pengabdian kepada masyarakat, dengan demikian harapannya adalah desa binaan tersebut mampu untuk menjadi desa mandiri, dan outputnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Saat ini melihat rendahnya kualitas SDM aparatur pemerintahan desa sehingga menjadi permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan dimensi dinamis dan unik karena setiap manusia memiliki sifat, karakter, motivasi dan emosi yang berbeda-beda sehingga membutuhkan

penanganan/*manage* yang berbeda pula untuk setiap personalnya. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting pada setiap organisasi, dimana manusia sebagai penggerak dan pengelola sumberdaya-sumberdaya lainnya.

Oleh karena itu salah satu tanggung jawab organisasi adalah memperoleh, menata, memotivasi dan mengendalikan sumberdaya-sumberdaya manusianya untuk mencapai kemajuan organisasi dengan efektif. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahanan desa untuk mewujudkan *good governance* pada level desa perlu adanya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa. Manajemen/ pengelolaan SDM aparatur pemerintah desa ini merupakan kebutuhan mendesak untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera dalam pencapaian birokrasi di tingkat pemerintahan desa yang baik. Sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum di desa, SDM aparat desa di Desa Wantilan masih belum sepenuhnya professional.

Hal ini menjadi perhatian bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani untuk memberikan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia, dengan harapan bahwa aparatur desa nantinya mampu lebih optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga mampu untuk lebih kreatif serta inovatif dengan memanfaatkan digitalisasi melalui teknologi informasi, untuk mengoptimalkan potensi desa menuju desa mandiri.

Tujuan pengembangan sumber daya manusia mempunyai dua dimensi yaitu dimensi individual dan dimensi institusional. Tujuan yang berdimensi individual mengacu kepada sesuatu yang dicapai oleh seorang pegawai. Tujuan berdimensi institusional mengacu kepada apa yang dapat dicapai oleh organisasi. Pengembangan sumber daya aparatur sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan aparatur baik kemampuan profesionalnya, kemampuan wawasannya, kemampuan kepemimpinannya maupun kemampuan pengabdianannya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja seorang aparatur (Rivai, 2009).

Tujuan *e-government* adalah menyediakan informasi kepada warga, pelayanan yang lebih baik dan pemberdayaan masyarakat melalui ketersediaan akses terhadap ICT dan partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik (*e-government readiness report* 2005 UN). Hal penting yang perlu ditegaskan bahwa *e-government* terkait erat dengan efisiensi dan efektifitas layanan publik oleh pemerintah (Surendro, 2006).

Pendapat yang sama mengenai apa *e-government* juga dijelaskan oleh (Wijaya, 2007) adalah perlunya transformasi model pemerintahan menuju model *e-government*. Model *e-government* dirumuskan sebagai model pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat atau publik. Model ini meletakkan masyarakat sebagai “pusat” dari aktivitas pemerintah. Model pemerintahan ini menempatkan masyarakat sebagai “konsumen” dari bisnis “jasa” pelayanan publik pemerintah. Layanan yang dikembangkan oleh pemerintah berorientasi pada kebutuhan masyarakat bukan pada kepentingan pemerintah. Penerapan *e-government* merupakan upaya pemerintah mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi berperan sebagai “alat” yang diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Permasalahan dalam efektivitas *e-government* akan menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan “masalah organisasi” dengan tidak meninggalkan “masalah berbau teknologi”. Budaya organisasi merupakan masalah organisasi yang terkait dengan masalah kesiapan penerapan *e-government*.

Menurut (Retnowati, 2008) *e-governemt* adalah suatu aplikasi berbasis komputer dan Internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada warga masyarakatnya atau yang sering disebut dengan istilah G2C (*Government to Citizen*). Di samping itu juga hubungan antara pemerintah dengan perusahaan yang sering disebut G2B (*Government to Business*). Bahkan terhadap pemerintah daerah atau negara lain yang sering disebut G2G (*Government to Government*) sebagai mitranya. Pembangunan hubungan yang lebih komunikatif, kemudahan layanan administratif dan transaksi serta penyajian informasi inilah yang menjadi dasar pembangunan aplikasi e-Gov tersebut.

Menurut Krisna Nugraha dalam (Ardila, 2013) kemajuan teknologi komunikasi dan info yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Selain itu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan atau *E-Government* akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. Masalah**

Adapun identifikasi dan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman terkait manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintah desa untuk mengelola pemerintahan desa sehingga memiliki daya saing

2. Minimnya kapasitas aparatur desa yang menyebabkan pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat belum berjalan optimal
3. Masih rendahnya kemampuan pemerintah desa dalam hal manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi.

### **C. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: “Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan *e-government* di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang”, Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dalam berbagai bentuk atau tahapan kegiatan yang dilakukan, antara lain meliputi:

1. Tahap Persiapan; dalam tahap persiapan ini penyelenggara kegiatan pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani melakukan sosialisasi terkait akan diselenggarakannya kegiatan ini. Sosialisasi dilakukan kepada Kepala Desa Wantilan dan seluruh aparatur Pemerintah Desa Wantila, serta BUMdes. Tahap persiapan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu.
2. Tahap Pelaksanaan; Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan *e-government* di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” dilaksanakan pada hari Selasa, 20 September 2022 melalui metode konvensional/ luring atau tatap muka yang bertempat di Balai Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara *offline* dengan jumlah peserta 30 orang dari unsur aparatur pemerintah desa, Bumdes, BPDes, dan PKK. Pelaksanaan pertama dilakukan dengan penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi *Focus Group Discussion* dan terakhir pelatihan atau simulasi dalam pembuatan konten di media sosial pemerintah desa.
3. Tahap Evaluasi; pada tahap kegiatan ini, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengevaluasi seluruh kegiatan dari mulai persiapan, pelaksanaan, pembuatan laporan kegiatan sampai kepada luaran kegiatan termasuk dalam perihal publikasi hasil kegiatan.

#### **D. Pembahasan**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), terus mendorong untuk adanya pemanfaat teknologi digital di level desa. Digitalisasi desa sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, selain itu digitalisasi di level desa digunakan untuk mempercepat gerak ekonomi desa. Desa di Indonesia telah banyak mempunyai produk unggulan baik dalam bentuk barang dan jasa (Novri/Humas Kemendes PDTT, 2021). Melalui pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan para aparatur desa dan masyarakat desa dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkat ekonomi desa.

Pemahaman yang diberikan kepada para aparatur desa dan masyarakat desa dimulai dari pengenalan lebih dalam dan terperinci mengenai teknologi informasi atau yang disebut dengan literasi digital. Literasi digital diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kecakapan masyarakat untuk pembangunan ekonomi usaha masyarakat desa. Hal ini mendukung daya saing masyarakat desa dalam ekonomi maupun pendidikan. Dengan pengetahuan mengenai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dalam kewirausahaan masyarakat desa, maka bisa mengurangi ketimpangan yang ada.

Pada penyampaian materi, pemateri menyampaikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan *e-government*. *E-government* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Adapun manfaat dari *e-government* yang dapat dirasakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
- 2) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling

curiga dan kekesalan dari semua pihak.

- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya teknologi informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah seperti jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang sesuai untuk anaknya.
- 4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan *video conference*. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama.



Gambar 1. Penyampaian Materi

Hasil *Focus Group Discussion* Kegiatan dalam “Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan *e-government* di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” sebagai berikut:

1. Pengelolaan sosial media secara berkala. Khususnya dalam publikasi di sosial media, membuat narasi dan konten yang menarik masyarakat umum untuk melihat dan membaca.
2. Website resmi pemerintah desa agar rajin diakses masyarakat
3. Masyarakat umum khususnya pelaku usaha mampu mempromosikan produknya di *e-commerce* baik tingkat nasional maupun tingkat internasional



Gambar 2. Sesi *Focus Group Discussion*

Melalui pengabdian kepada masyarakat ini juga memberikan pemahaman terkait pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan *smart economic* untuk promosi produk desa. Banyak potensi desa belum terekspos oleh media massa. Untuk itu melalui pemanfaatan teknologi informasi, masyarakat desa dapat mengenalkan potensi desa yang mereka miliki ke masyarakat nasional ataupun internasional. Pengabdian kepada masyarakat ini aparaturnya pemerintah desa dengan masyarakat desa, diberikan pemahaman dan pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mempromosikan potensi desa yang dimiliki, agar menjadi *smart village*.

Melalui berbagai bentuk atau metode yang diberikan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam Penerapan *e-Government* di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” ini, alhasil mampu membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi para Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa di Desa Wantilan sebagai modal awal dalam menata organisasi pemerintahan termasuk organisasi Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam era globalisasi dan digitalisasi. Penerapan Teknologi Informasi dalam organisasi pemerintahan saat ini sudah merupakan keharusan melekat teknologi. Sumber daya aparatur harus mampu mengoperasikan sistem berbasis digital dalam pemberian pelayanan yang maksimal ke masyarakat.



Gambar 3. Dosen IP dan Perangkat Desa

Kecanggihan teknologi saat ini di dunia organisasi pemerintahan sudah merubah sistem pelayanan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik dalam tata Kelola Sumber Daya Manusia. Peran Teknologi informasi dalam pemerintahan sangat lah besar dan hal ini harus diimbangi dengan kesiapan para aparatur sebagai pelaksanan suatu sistem dalam organisasi pemerintahan Desa ini. Melalui pelatihan ini diharapkan mampu membekali dan ikut mempersiapkan para aparatur pemerintah desa dalam peningkatan proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam oragnisasi pemerintahan desa tersebut. Terdeskripsikan dengan jelas bahwa diskusi yang terjadi dalam kegiatan “Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan *e-government* di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” tersebut khususnya saat ini sudah menjadi keharusan meleak teknologi dalam rangka kesiapan menghadapi arus globalisasi dan digitalisasi.

### **E. Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi positif bagi upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, digitalisasi desa, *e-government*, dan *smart village*. Kegiatan ini secara umum memberikan kontribusi kepada peserta untuk membangun desa cerdas dan memanfaatkan teknologi informasi dalam mempromosikan dan memajukan Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang.

## F. Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani yang telah mendanai Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, V. (2016). Human Resource Development Strategies For Village Apparatus in Realizing Effective Village Governance at Boalemo Regency, Gorontalo Province. *The International Journal Of Engineering And Science (IJES)*, 43-47.
- Ardila, N. (2013). Pentingnya Revitalisasi E-Government di Provinsi Lampung. *E-Jurnal Sistem Informasi* , 1.
- Nasroen. (1995). *Daerah Tingkat Terbawah*. Jakarta: Beringin Trading Company.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Retnowati, N. D. (2008). Peranan E-Government dalam Rangka Mewujudkan Good Governance bagi Masyarakat. *Seminar Nasional Informatika* , 205.
- Rivai, V. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Surendro, S. W. (2006). Kajian Teoritis: Model E-Government Readiness Pemerintah Kabupaten/Kotamadya dan Keberhasilan E-government. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*, 25.
- Wijaya, S. W. (2007). Budaya Organisasi dan Efektivitas Penerapan E-Government. *Seminar Nasional Aplikasi Informatika*, 10.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa